



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARYANTO
2. Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN
3. NHK : 786035

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 675.000.000

1. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 885 m2/187 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 1504 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 75.000.000
4. Tanah Seluas 2919 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
5. Tanah Seluas 607 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
6. Tanah Seluas 1580 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
7. Tanah Seluas 1304 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 108.000.000

1. MOTOR, HONDA NC110A1C A/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, HONDA D1A02N18M1 A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI OUTLANDER SPORT 2.OL PX-E AT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	103.244.470
F. HARTA LAINNYA	Rp.	40.000.000
Sub Total	Rp.	926.244.470
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	926.244.470

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.